

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki bermacam strategi dalam mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu metode dalam pengentasan kemiskinan dengan memaksimalkan masyarakat lokal dalam berkarya sehingga akan mencapai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dimasa kini, lembaga ekonomi pedesaan yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat masih menjadi bagian yang penting dalam masyarakat Desa tetapi pengaruhnya bagi masyarakat masih kurang. Sebagai usaha Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mendorong seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain

itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.¹

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Potensi yang dimiliki oleh BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat Desa khususnya yang bergerak di bidang ekonomi, tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dibentuk dan dikelola oleh masyarakat Desa secara produktif dalam rangka pemberdayaan perekonomian. Hal ini kemudian diharapkan oleh pemerintah agar masyarakat Desa tidak mengalami kesulitan lagi dalam mengembangkan usahanya termasuk dalam hal pemasaran karena BUMDes diharapkan dapat menjadi wadah yang tepat untuk hal itu.

Pembentukan BUMDes di Desa tentunya tidak semudah yang dikira, beberapa pertimbangan aspek tentunya perlu untuk diperhatikan. Salah satu aspek utama yang tentunya harus diperhatikan dalam pembentukan BUMDes adalah

¹Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 3

²Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

sumber daya manusia yang memadai karena hal tersebut merupakan bagian terpenting dari sukses atau tidaknya program BUMDes yang nanti akan dijalankan. Masing-masing Desa mungkin memiliki potensi Desa yang patut untuk digali agar dapat menunjang perekonomian yang ada di Desa tersebut, akan tetapi itu semua akan sangat kurang berarti jika sumber daya manusia yang kurang. Karena nantinya dalam pengelolaannya dibutuhkan sumber daya manusia yang baik agar tidak terjadi ketimpangan.

Pemanfaatan sumber daya manusia tentunya dianggap penting dalam pemenuhan kebutuhan BUMDes. Salah satu BUMDes yang berada di kabupaten Gorontalo yakni BUMDes Walama yang terletak di Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru. BUMDes Walama memiliki tiga program yang telah berjalan dari tahun 2019, ketiga program tersebut yakni program peminjaman uang, program penjualan beras, dan program pengumpulan sampah.

Salah satu aspek yang dibutuhkan dalam pemenuhan kerja BUMDes adalah adanya modal sosial yang baik antara pelaksana program baik itu antara pemerintah desa, pengurus BUMDes maupun masyarakat Desa. Modal sosial dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan hubungan timbal balik di masyarakat. hal ini dikarenakan modal sosial merupakan modal yang mendasar yang harus dimiliki oleh individu dalam menjalin suatu hubungan dimasyarakat. Indikator dari modal sosial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kerjasama yang sering kita lakukan baik itu antara sesama individu maupun kelompok. Adanya perasaan saling percaya satu sama lain, serta norma yang baik dalam berperilaku di kehidupan masyarakat.

Modal sosial juga tidak hanya digunakan dalam meningkatkan hubungan yang baik didalam anggota masyarakat. akan tetapi peran modal sosial juga sangat dibutuhkan dalam hal pengembangan suatu bidang usaha yang akan dijalankan. Sama halnya dengan pengembangan BUMDes, dibutuhkan peran serta dari modal sosial dalam meningkatkan hubungan dimasyarakat baik itu antara Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes maupun masyarakat sebagai bagian dari pelaksana program BUMDes. Modal sosial dalam perannya juga memiliki arti sebagai penguatan hubungan dimasyarakat.

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh BUMDes dalam eksistensinya di lapangan terhadap program-program yang dijalankan tentunya tidak selamanya selalu berjalan dengan lancar, pasti terdapat beberapa hambatan yang harus dilalui sehingganya untuk melalui hambatan tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh pelaksana BUMDes baik itu pemerintah desa, pengurus BUMDes hingga masyarakat. Oleh sebab itu pentingnya modal sosial dalam pelaksanaan program BUMDes ini sehingga program-program yang dijalankan sesuai dengan kemauan bersama dan dijalankan dengan sebaik mungkin.

Terkait dengan persoalan yang penulis dapatkan dilapangan, terdapat beberapa fenomena sosial dalam pelaksanaan program BUMDes Walama. Fenomena yang dimaksud yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua BUMDes Walama bahwa sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh BUMDes kepada masyarakat masih kurang maksimal. Adapun koordinasi yang baik justru hanya dilakukan antar lembaga desa saja yaitu antara pihak Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes. sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Desa Tinel

bahwa untuk koordinasi yang dilakukan terkait dengan BUMDes hanya pada tingkat pemerintah Desa bersama dengan BUMDes saja. Terkait dengan aspirasi masyarakat telah diwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) karena BPD dianggap sebagai penampung aspirasi masyarakat dan juga penyalur kepada pemerintah Desa.

Fenomena mengenai kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes kepada masyarakat telah mengindikasikan bahwa salah satu unsur modal sosial yakni kerjasama belum terjalin secara maksimal.

Selain itu, beberapa dari program yang dijalankan oleh BUMDes Walama tersebut masih kurang dalam hal peningkatan usaha kecil mikro yang ada di Desa Tinelo. Hal ini terjadi karena metode kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes dengan masyarakat yang dalam hal ini pelaku usaha kecil hanya sebatas pada pinjam meminjam uang dalam hal penyertaan modal saja tetapi tidak pada pemasaran usaha yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha kecil ini. Metode ini tentunya hanya berdampak pada satu pihak saja yakni pada perkembangan BUMDes itu sendiri tetapi tidak pada usaha kecil yang ada di Desa tersebut. Sehingga perlunya BUMDes dalam meningkatkan usaha kecil yang ada di desa tersebut dalam hal pemasaran agar peningkatan usaha kecil yang ada di Desa tersebut dapat meningkat. Sehingga yang mengalami peningkatan tidak hanya pada BUMDes Walama itu sendiri tetapi para pelaku usaha juga dapat berkembang. Oleh sebab itu, perlunya peran modal sosial yang baik antara pemerintah Desa dengan Pengelola BUMDes serta masyarakat agar persoalan-

persoalan yang terdapat dalam pelaksanaan program BUMDes ini dapat diselesaikan bersama.

Berangkat dari uraian permasalahan diatas maka peneliti bermaksud mengangkat judul peneletian mengenai BUMDes yang berjudul “**Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Program BUMDes**” suatu penelitian yang dilakukan dengan fokus permasalahan yaiu **Modal Sosial antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program BUMDes yang Berada di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana modal sosial dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo ?”

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian atas permasalahan yang akan diteliti adalah “ Untuk mengetahui bagaimana modal sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo ?”.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

- Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis dan juga Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana modal sosial yang terjadi antara pemerintah Desa dan masyarakat terhadap pelaksanaan program BUMDes di Desa Tinelo kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

- Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait dengan bagaimana modal sosial yang terjadi antara pemerintah Desa dan masyarakat terhadap pelaksanaan program BUMDes di Desa Tinelo kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.